



PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

P a s a l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	28.033.510.000,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.393.696.464.499,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	<u>53.767.444.671,00</u>	
Jumlah Pendapatan			Rp. 1.475.497.419.170,00
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	268.406.772.245,00	
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00	
3) Belanja Subsidi	Rp.	45.882.520.000,00	
4) Belanja Hibah	Rp.	95.717.653.400,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	162.535.300.000,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	37.037.200.000,00	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>	
			Rp. 610.579.445.645,00
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	106.927.735.000,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	410.836.889.265,50	
3) Belanja Modal	Rp.	<u>492.153.349.259,50</u>	
			Rp. 1.009.917.973.525,00
Jumlah Belanja			<u>Rp. 1.620.497.419.170,00</u>
Surplus / (Defisit)			Rp. (145.000.000.000,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	155.000.000.000,00	
b. Pengeluaran	Rp.	10.000.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	145.000.000.000,00,	
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp.		0,00

P a s a l 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

P a s a l 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

P a s a l 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Natuna.

P a s a l 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

P a s a l 6

Peraturan Bupati Natuna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal **18 Januari 2013**

BUPATI NATUNA

ttd

ILYAS SABL I

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal **18 Januari 2013**

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SYAMSURIZON, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610309 199203 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN **3** NOMOR **2013**

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN PENJABARAN APBD
Tahun Anggaran 2013

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN	
4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	28,033,510,000.00
4. 1. 1.	Hasil Pajak Daerah	4,021,660,000.00
4. 1. 1. 01.	Pajak Hotel	100,000,000.00
4. 1. 1. 01. 06.	Hotel bintang satu	100,000,000.00
4. 1. 1. 02.	Pajak Restoran	1,277,660,000.00
4. 1. 1. 02. 01.	Restoran	1,277,660,000.00
4. 1. 1. 03.	Pajak Hiburan	5,000,000.00
4. 1. 1. 03. 02.	Pagelaran kesenian/musik/tari/busana	5,000,000.00
4. 1. 1. 04.	Pajak Reklame	60,500,000.00
4. 1. 1. 04. 01.	Reklame papan/bill board/vidiotron/megatron	60,500,000.00
4. 1. 1. 05.	Pajak Penerangan Jalan	2,450,000,000.00
4. 1. 1. 05. 01.	Pajak penerangan jalan PLN	800,000,000.00
4. 1. 1. 05. 02.	Pajak penerangan jalan non PLN	1,650,000,000.00
4. 1. 1. 06.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	40,000,000.00
4. 1. 1. 06. 06.	Batu kerikil	40,000,000.00
4. 1. 1. 07.	Pajak Parkir	25,000,000.00
4. 1. 1. 07. 01.	Pajak parkir	25,000,000.00
4. 1. 1. 08.	Pajak Air Tanah	2,500,000.00
4. 1. 1. 08. 01.	Pajak air tanah	2,500,000.00
4. 1. 1. 09.	Pajak Sarang Burung Walet	11,000,000.00
4. 1. 1. 09. 01.	Pajak sarang burung walet	11,000,000.00
4. 1. 1. 12.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	50,000,000.00
4. 1. 1. 12. 01.	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	50,000,000.00
4. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	661,850,000.00
4. 1. 2. 01.	Retribusi Jasa Umum	330,250,000.00
4. 1. 2. 01. 01.	Retribusi pelayanan kesehatan	300,000,000.00
4. 1. 2. 01. 13.	Retribusi pengendalian menara telekomunikasi	30,250,000.00
4. 1. 2. 02.	Retribusi Jasa Usaha	192,600,000.00
4. 1. 2. 02. 11.	Retribusi penyeberangan di air	72,600,000.00
4. 1. 2. 02. 16.	Retribusi angkutan bus	120,000,000.00
4. 1. 2. 03.	Retribusi Perizinan Tertentu	139,000,000.00
4. 1. 2. 03. 01.	Retribusi izin mendirikan bangunan	66,000,000.00
4. 1. 2. 03. 05.	Retribusi izin usaha perikanan	66,000,000.00
4. 1. 2. 03. 11.	Retribusi izin usaha pariwisata	4,500,000.00
4. 1. 2. 03. 12.	Retribusi izin usaha kesehatan	2,500,000.00
4. 1. 3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,900,000,000.00
4. 1. 3. 01.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3,900,000,000.00
4. 1. 3. 01. 01.	Perusahaan daerah	50,000,000.00
4. 1. 3. 01. 03.	Devиден BUMD	3,850,000,000.00
4. 1. 4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19,450,000,000.00
4. 1. 4. 02.	Penerimaan Jasa Giro	4,050,000,000.00
4. 1. 4. 02. 01.	Jasa giro kas daerah	3,500,000,000.00
4. 1. 4. 02. 02.	Jasa giro pemegang kas	550,000,000.00
4. 1. 4. 03.	Pendapatan Bunga Deposito	9,600,000,000.00
4. 1. 4. 03. 01.	Rekening deposito pada bank	9,600,000,000.00
4. 1. 4. 15.	Pendapatan BLUD	5,800,000,000.00
4. 1. 4. 15. 01.	Pendapatan BLUD	5,800,000,000.00
4. 2.	Dana Perimbangan	1,393,696,464,499.00
4. 2. 1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	1,140,987,292,499.00
4. 2. 1. 01.	Bagi Hasil Pajak	235,751,830,915.00
4. 2. 1. 01. 01.	Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan	219,558,057,657.00
4. 2. 1. 01. 02.	Bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPH pasal 21	8,988,368,419.00
4. 2. 1. 01. 03.	Bagi hasil dari biaya pungut PBB	7,205,404,839.00
4. 2. 1. 02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	905,235,461,584.00
4. 2. 1. 02. 02.	Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan	3,500,000.00
4. 2. 1. 02. 05.	Bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti)	5,141,323,000.00
4. 2. 1. 02. 06.	Bagi hasil dari pungutan pengusaha perikanan	241,448,692.00
4. 2. 1. 02. 08.	Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi	448,696,762,635.00
4. 2. 1. 02. 09.	Bagi hasil dari pertambangan gas bumi	451,152,427,257.00
4. 2. 2.	Dana Alokasi Umum	177,949,262,000.00
4. 2. 2. 01.	Dana Alokasi Umum	177,949,262,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4. 2. 2. 01. 01.	Dana alokasi umum	177,949,262,000.00
4. 2. 3.	Dana Alokasi Khusus	74,759,910,000.00
4. 2. 3. 01.	Dana Alokasi Khusus	74,759,910,000.00
4. 2. 3. 01. 01.	DAK pendidikan	12,496,250,000.00
4. 2. 3. 01. 02.	DAK kesehatan	7,837,590,000.00
4. 2. 3. 01. 03.	DAK infrastruktur jalan	17,648,620,000.00
4. 2. 3. 01. 05.	DAK infrastruktur air minum	1,359,770,000.00
4. 2. 3. 01. 06.	DAK infrastruktur sanitasi	1,045,780,000.00
4. 2. 3. 01. 08.	DAK kelautan dan perikanan	4,513,080,000.00
4. 2. 3. 01. 09.	DAK pertanian	3,285,140,000.00
4. 2. 3. 01. 10.	DAK lingkungan hidup	1,342,240,000.00
4. 2. 3. 01. 11.	DAK keluarga berencana	862,580,000.00
4. 2. 3. 01. 12.	DAK kehutanan	1,407,370,000.00
4. 2. 3. 01. 13.	DAK sarana prasarana daerah tertinggal	2,872,400,000.00
4. 2. 3. 01. 14.	DAK perdagangan	2,196,800,000.00
4. 2. 3. 01. 15.	DAK keselamatan transportasi darat	357,150,000.00
4. 2. 3. 01. 18.	DAK sarana prasarana kawasan perbatasan	17,535,140,000.00
4. 3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	53,767,444,671.00
4. 3. 3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	19,969,184,180.00
4. 3. 3. 01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	19,969,184,180.00
4. 3. 3. 01. 01.	Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	3,282,589,640.00
4. 3. 3. 01. 02.	Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor	1,960,212,100.00
4. 3. 3. 01. 03.	Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	14,634,360,730.00
4. 3. 3. 01. 04.	Bagi hasil dari pajak air permukaan	92,021,710.00
4. 3. 4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	12,475,919,000.00
4. 3. 4. 01.	Pendapatan Dana Penyesuaian	12,475,919,000.00
4. 3. 4. 01. 02.	Tambahan penghasilan guru PNSD	2,463,000,000.00
4. 3. 4. 01. 03.	Tunjangan profesi guru PNSD	10,012,919,000.00
4. 3. 5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	21,322,341,491.00
4. 3. 5. 01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	21,322,341,491.00
4. 3. 5. 01. 01.	Bantuan keuangan dari Provinsi lain-lain	21,322,341,491.00
	Jumlah	1,475,497,419,170.00
5.	BELANJA	
5. 1.	Belanja Tidak Langsung	610,579,445,645.00
5. 1. 1.	Belanja Pegawai	268,406,772,245.00
5. 1. 1. 01.	Gaji dan Tunjangan	138,152,047,245.00
5. 1. 1. 01. 01.	Gaji pokok PNS/uang representasi 1)	92,469,600,132.00
5. 1. 1. 01. 02.	Tunjangan keluarga	10,710,588,141.00
5. 1. 1. 01. 03.	Tunjangan jabatan 1)	7,304,707,750.00
5. 1. 1. 01. 04.	Tunjangan fungsional	6,721,656,253.00
5. 1. 1. 01. 06.	Tunjangan beras 1)	7,452,046,118.00
5. 1. 1. 01. 07.	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	3,182,433,340.00
5. 1. 1. 01. 08.	Pembulatan gaji	49,755,273.00
5. 1. 1. 01. 09.	Iuran asuransi kesehatan	1,679,856,053.00
5. 1. 1. 01. 10.	Uang paket 2)	38,682,000.00
5. 1. 1. 01. 11.	Tunjangan panitia musyawarah 2)	25,395,300.00
5. 1. 1. 01. 12.	Tunjangan komisi 2)	30,145,500.00
5. 1. 1. 01. 13.	Tunjangan panitia anggaran 2)	16,625,700.00
5. 1. 1. 01. 14.	Tunjangan badan kehormatan 2)	7,125,300.00
5. 1. 1. 01. 15.	Tunjangan alat kelengkapan lainnya 2)	14,798,700.00
5. 1. 1. 01. 16.	Tunjangan perumahan 2)	3,684,000,000.00
5. 1. 1. 01. 17.	Uang duka wafat/tewas 2)	170,000,000.00
5. 1. 1. 01. 18.	Uang jasa pengabdian 2)	32,235,000.00
5. 1. 1. 01. 19.	Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD	312,480,000.00
5. 1. 1. 01. 21.	Tunjangan umum	4,249,916,685.00
5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	127,942,725,000.00
5. 1. 1. 02. 01.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	3,722,000,000.00
5. 1. 1. 02. 02.	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas	78,823,725,000.00
5. 1. 1. 02. 03.	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja	24,707,000,000.00
5. 1. 1. 02. 04.	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	18,190,000,000.00
5. 1. 1. 02. 06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	2,500,000,000.00
5. 1. 1. 03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,812,000,000.00
5. 1. 1. 03. 01.	Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD	1,512,000,000.00
5. 1. 1. 03. 02.	Belanja penunjang operasional KDH/WKDH	300,000,000.00
5. 1. 1. 05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	500,000,000.00
5. 1. 1. 05. 01.	Insentif pemungutan pajak daerah	500,000,000.00
5. 1. 3.	Belanja Subsidi	45,882,520,000.00
5. 1. 3. 01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	39,742,846,000.00
5. 1. 3. 01. 01.	Belanja subsidi kepada perusahaan	39,742,846,000.00
5. 1. 3. 02.	Belanja Subsidi kepada Masyarakat/Perorangan	6,139,674,000.00
5. 1. 3. 02. 01.	Belanja subsidi kepada rumah tangga miskin (RTM)	6,139,674,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 1. 4.	Belanja Hibah	95,717,653,400.00
5. 1. 4. 01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5,450,000,000.00
5. 1. 4. 01. 01.	Pemerintah pusat	5,450,000,000.00
5. 1. 4. 04.	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN 4)	2,000,000,000.00
5. 1. 4. 04. 01.	Perusahaan daerah/ BUMD/ BUMN	2,000,000,000.00
5. 1. 4. 05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	74,214,500,000.00
5. 1. 4. 05. 01.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang keagamaan	25,902,500,000.00
5. 1. 4. 05. 02.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang kepemudaan dan olah raga	8,340,000,000.00
5. 1. 4. 05. 03.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang kesenian dan kebudayaan	4,290,000,000.00
5. 1. 4. 05. 04.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang kewanitaan	4,730,000,000.00
5. 1. 4. 05. 05.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang profesi	1,660,000,000.00
5. 1. 4. 05. 06.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang non profesi	450,000,000.00
5. 1. 4. 05. 07.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang sosial kemasyarakatan	8,615,000,000.00
5. 1. 4. 05. 08.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang pendidikan dan penelitian	20,227,000,000.00
5. 1. 4. 08.	Belanja Hibah DAK	14,053,153,400.00
5. 1. 4. 08. 01.	Belanja hibah DAK	14,053,153,400.00
5. 1. 5.	Belanja Bantuan Sosial	162,535,300,000.00
5. 1. 5. 02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	108,477,500,000.00
5. 1. 5. 02. 03.	Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat untuk pemberdayaan sosial	85,330,500,000.00
5. 1. 5. 02. 05.	Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan	23,147,000,000.00
5. 1. 5. 03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	54,057,800,000.00
5. 1. 5. 03. 02.	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk perlindungan sosial	3,000,000,000.00
5. 1. 5. 03. 03.	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk pemberdayaan sosial	27,555,000,000.00
5. 1. 5. 03. 04.	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk jaminan sosial	23,502,800,000.00
5. 1. 7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	37,037,200,000.00
5. 1. 7. 03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	11,690,000,000.00
5. 1. 7. 03. 01.	Belanja bantuan keuangan kepada desa	11,690,000,000.00
5. 1. 7. 04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya	24,837,200,000.00
5. 1. 7. 04. 03.	Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa	21,837,200,000.00
5. 1. 7. 04. 04.	Belanja Bantuan keuangan kepada pemerintah pusat	3,000,000,000.00
5. 1. 7. 05.	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	510,000,000.00
5. 1. 7. 05. 01.	Belanja bantuan kepada partai politik	510,000,000.00
5. 1. 8.	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00
5. 1. 8. 01.	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00
5. 1. 8. 01. 01.	Belanja tidak terduga	1,000,000,000.00
5. 2.	Belanja Langsung	1,009,917,973,525.00
5. 2. 1.	Belanja Pegawai	106,927,735,000.00
5. 2. 1. 01.	Honorarium PNS	34,851,765,500.00
5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	13,641,685,000.00
5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	1,109,140,000.00
5. 2. 1. 01. 03.	Honorarium pejabat dan staf pelaksana teknis kegiatan	7,286,430,000.00
5. 2. 1. 01. 04.	Honorarium panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan	959,015,000.00
5. 2. 1. 01. 05.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/fasilitator PNS	5,647,529,000.00
5. 2. 1. 01. 06.	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan	6,207,966,500.00
5. 2. 1. 02.	Honorarium Non PNS	70,204,434,500.00
5. 2. 1. 02. 01.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3,701,654,500.00
5. 2. 1. 02. 02.	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	51,860,825,000.00
5. 2. 1. 02. 03.	Honorarium staf administrasi kegiatan	1,790,700,000.00
5. 2. 1. 02. 04.	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan	11,517,455,000.00
5. 2. 1. 02. 05.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,333,800,000.00
5. 2. 1. 03.	Uang Lembur	7,310,000.00
5. 2. 1. 03. 01.	Uang lembur PNS	800,000.00
5. 2. 1. 03. 02.	Uang lembur non PNS	6,510,000.00
5. 2. 1. 05.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1,864,225,000.00
5. 2. 1. 05. 02.	Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat	1,864,225,000.00
5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	410,836,889,265.50
5. 2. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20,132,327,177.00
5. 2. 2. 01. 01.	Belanja alat tulis kantor	10,215,595,600.00
5. 2. 2. 01. 02.	Belanja dokumentasi/administrasi tender	242,769,577.00
5. 2. 2. 01. 03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batttry kering)	319,240,000.00
5. 2. 2. 01. 04.	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	1,647,668,750.00
5. 2. 2. 01. 05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,057,100,000.00
5. 2. 2. 01. 06.	Belanja bahan bakar minyak/gas	5,318,193,250.00
5. 2. 2. 01. 07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	108,000,000.00
5. 2. 2. 01. 09.	Belanja spanduk	964,260,000.00
5. 2. 2. 01. 10.	Belanja dekorasi	259,500,000.00
5. 2. 2. 02.	Belanja Bahan/Material	20,254,039,001.00
5. 2. 2. 02. 01.	Belanja bahan baku bangunan	150,000,000.00
5. 2. 2. 02. 02.	Belanja bahan/bibit tanaman	2,244,160,000.00
5. 2. 2. 02. 04.	Belanja bahan obat-obatan	7,910,723,201.00
5. 2. 2. 02. 05.	Belanja bahan kimia	400,503,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 2. 02. 06.	Belanja bahan alat-alat olahraga	324,335,000.00
5. 2. 2. 02. 07.	Belanja alat perlengkapan	8,133,567,800.00
5. 2. 2. 02. 08.	Belanja material/hadiah	1,090,750,000.00
5. 2. 2. 03.	Belanja Jasa Kantor	38,813,167,473.00
5. 2. 2. 03. 01.	Belanja air	450,532,000.00
5. 2. 2. 03. 02.	Belanja telepon	582,400,000.00
5. 2. 2. 03. 03.	Belanja listrik	5,077,864,000.00
5. 2. 2. 03. 04.	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	12,000,000.00
5. 2. 2. 03. 05.	Belanja surat kabar/majalah	2,303,200,000.00
5. 2. 2. 03. 06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4,407,600,000.00
5. 2. 2. 03. 07.	Belanja paket/pengiriman	668,873,500.00
5. 2. 2. 03. 08.	Belanja sertifikasi	154,008,000.00
5. 2. 2. 03. 10.	Belanja jasa administrasi pemungutan pajak penerangan jalan umum	850,000,000.00
5. 2. 2. 03. 13.	Belanja jasa medis/laboratorium	10,441,668,673.00
5. 2. 2. 03. 14.	Belanja jasa kebersihan	1,567,159,000.00
5. 2. 2. 03. 15.	Belanja jasa kesenian	524,500,000.00
5. 2. 2. 03. 16.	Belanja jasa administrasi	1,847,600,000.00
5. 2. 2. 03. 17.	Belanja jasa publikasi	3,478,862,300.00
5. 2. 2. 03. 19.	Belanja jasa humas	5,000,000,000.00
5. 2. 2. 03. 20.	Belanja jasa protokol	191,400,000.00
5. 2. 2. 03. 21.	Belanja jasa keamanan	960,500,000.00
5. 2. 2. 03. 22.	Belanja perangkat lunak (software)	295,000,000.00
5. 2. 2. 04.	Belanja Premi Asuransi	551,590,000.00
5. 2. 2. 04. 01.	Belanja premi asuransi kesehatan 2)	546,790,000.00
5. 2. 2. 04. 02.	Belanja premi asuransi barang milik daerah	4,800,000.00
5. 2. 2. 05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14,023,530,000.00
5. 2. 2. 05. 01.	Belanja jasa service	5,641,400,000.00
5. 2. 2. 05. 02.	Belanja penggantian suku cadang	3,278,900,000.00
5. 2. 2. 05. 03.	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	4,482,630,000.00
5. 2. 2. 05. 05.	Belanja surat tanda nomor kendaraan	620,600,000.00
5. 2. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,490,229,700.00
5. 2. 2. 06. 01.	Belanja cetak	7,199,269,000.00
5. 2. 2. 06. 02.	Belanja penggandaan	4,755,964,200.00
5. 2. 2. 06. 03.	Belanja dokumentasi	534,996,500.00
5. 2. 2. 07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,999,860,000.00
5. 2. 2. 07. 01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	420,000,000.00
5. 2. 2. 07. 02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4,018,960,000.00
5. 2. 2. 07. 03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	560,900,000.00
5. 2. 2. 08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18,692,076,550.00
5. 2. 2. 08. 01.	Belanja sewa sarana mobilitas darat	4,848,885,000.00
5. 2. 2. 08. 02.	Belanja sewa sarana mobilitas air	13,843,191,550.00
5. 2. 2. 10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	651,820,000.00
5. 2. 2. 10. 01.	Belanja sewa meja kursi	79,613,500.00
5. 2. 2. 10. 04.	Belanja sewa generator	61,306,500.00
5. 2. 2. 10. 05.	Belanja sewa tenda	193,500,000.00
5. 2. 2. 10. 07.	Belanja sewa peralatan sound sistem	317,400,000.00
5. 2. 2. 11.	Belanja Makanan dan Minuman	31,548,232,488.00
5. 2. 2. 11. 01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,009,805,000.00
5. 2. 2. 11. 02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,193,834,438.00
5. 2. 2. 11. 03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2,420,900,000.00
5. 2. 2. 11. 04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17,664,693,050.00
5. 2. 2. 11. 05.	Belanja makanan dan minuman pelajar/siswa	1,800,000,000.00
5. 2. 2. 11. 06.	Belanja makanan dan minuman pasien	459,000,000.00
5. 2. 2. 12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3,857,889,600.00
5. 2. 2. 12. 01.	Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH	17,910,000.00
5. 2. 2. 12. 02.	Belanja pakaian sipil harian (PSH)	3,559,874,000.00
5. 2. 2. 12. 03.	Belanja pakaian sipil lengkap (PSL)	7,841,600.00
5. 2. 2. 12. 04.	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	49,334,000.00
5. 2. 2. 12. 05.	Belanja pakaian dinas upacara (PDU)	160,000,000.00
5. 2. 2. 12. 06.	Belanja pakaian sipil resmi (PSR)	57,050,000.00
5. 2. 2. 12. 08.	Belanja atribut	5,880,000.00
5. 2. 2. 13.	Belanja Pakaian Kerja	713,493,000.00
5. 2. 2. 13. 01.	Belanja pakaian kerja lapangan	693,493,000.00
5. 2. 2. 13. 02.	Belanja pakaian dinas non PNS	20,000,000.00
5. 2. 2. 14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3,794,506,200.00
5. 2. 2. 14. 01.	Belanja pakaian KORPRI	886,200.00
5. 2. 2. 14. 02.	Belanja pakaian adat daerah	128,050,000.00
5. 2. 2. 14. 03.	Belanja pakaian batik tradisional	2,526,475,000.00
5. 2. 2. 14. 04.	Belanja pakaian olahraga	592,895,000.00
5. 2. 2. 14. 06.	Belanja pakaian seragam	520,000,000.00
5. 2. 2. 14. 07.	Belanja pakaian kegiatan	26,200,000.00
5. 2. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	145,115,611,100.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 2. 15. 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38,312,626,350.00
5. 2. 2. 15. 02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	85,970,499,000.00
5. 2. 2. 15. 03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	292,120,000.00
5. 2. 2. 15. 04.	Belanja transportasi dan akomodasi	20,540,365,750.00
5. 2. 2. 16.	Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS	2,927,000,000.00
5. 2. 2. 16. 01.	Belanja beasiswa tugas belajar D3	840,000,000.00
5. 2. 2. 16. 02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1	1,215,000,000.00
5. 2. 2. 16. 03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	500,000,000.00
5. 2. 2. 16. 05.	Belanja beasiswa tugas belajar spesialis	300,000,000.00
5. 2. 2. 16. 06.	Belanja pendidikan PNS ikatan dinas	72,000,000.00
5. 2. 2. 17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5,650,655,150.00
5. 2. 2. 17. 01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	4,796,236,150.00
5. 2. 2. 17. 03.	Belanja kontribusi diklat teknis/fungsional	90,000,000.00
5. 2. 2. 17. 04.	Belanja kontribusi bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, dan lokakarya	269,000,000.00
5. 2. 2. 17. 05.	Belanja penelitian dan studi	25,000,000.00
5. 2. 2. 17. 06.	Belanja kontribusi diklat struktural	470,419,000.00
5. 2. 2. 18.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	75,000,000.00
5. 2. 2. 18. 01.	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	75,000,000.00
5. 2. 2. 19.	Belanja Pemulangan Pegawai	63,000,000.00
5. 2. 2. 19. 01.	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah	63,000,000.00
5. 2. 2. 20.	Belanja Pemeliharaan	23,046,375,572.50
5. 2. 2. 20. 01.	Belanja pemeliharaan jalan	1,319,000,000.00
5. 2. 2. 20. 03.	Belanja pemeliharaan bangunan	9,904,531,333.50
5. 2. 2. 20. 04.	Belanja pemeliharaan jaringan	4,244,600,000.00
5. 2. 2. 20. 05.	Belanja pemeliharaan peralatan	6,786,244,239.00
5. 2. 2. 20. 07.	Belanja pemeliharaan sistem komputerisasi (software)	567,000,000.00
5. 2. 2. 20. 09.	Belanja pemeliharaan perlengkapan	225,000,000.00
5. 2. 2. 21.	Belanja Jasa Konsultasi	36,932,569,466.00
5. 2. 2. 21. 01.	Belanja jasa konsultasi penelitian	3,421,450,000.00
5. 2. 2. 21. 02.	Belanja jasa konsultasi perencanaan	17,206,729,447.00
5. 2. 2. 21. 03.	Belanja jasa konsultasi pengawasan	14,718,313,019.00
5. 2. 2. 21. 04.	Belanja jasa konsultasi manajemen	1,376,077,000.00
5. 2. 2. 21. 05.	Belanja jasa konsultasi IT	170,000,000.00
5. 2. 2. 21. 06.	Belanja jasa konsultasi keuangan	40,000,000.00
5. 2. 2. 23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15,513,216,788.00
5. 2. 2. 23. 01.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	15,513,216,788.00
5. 2. 2. 25.	Belanja Barang Dana BROS	10,990,700,000.00
5. 2. 2. 25. 01.	Belanja barang BROS	10,990,700,000.00
5. 2. 3.	Belanja Modal	492,153,349,259.50
5. 2. 3. 01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	4,500,000,000.00
5. 2. 3. 01. 06.	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar	500,000,000.00
5. 2. 3. 01. 07.	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan	150,000,000.00
5. 2. 3. 01. 08.	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan	150,000,000.00
5. 2. 3. 01. 31.	Belanja modal pengadaan tanah fasilitas umum dan sosial	3,700,000,000.00
5. 2. 3. 02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	800,000,000.00
5. 2. 3. 02. 01.	Belanja modal pengadaan traktor	600,000,000.00
5. 2. 3. 02. 12.	Belanja modal pengadaan mesin pompong/kapal	200,000,000.00
5. 2. 3. 03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	9,829,200,000.00
5. 2. 3. 03. 03.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	160,000,000.00
5. 2. 3. 03. 05.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	1,463,300,000.00
5. 2. 3. 03. 06.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	336,900,000.00
5. 2. 3. 03. 09.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	3,812,500,000.00
5. 2. 3. 03. 10.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	2,270,000,000.00
5. 2. 3. 03. 12.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	1,786,500,000.00
5. 2. 3. 04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	195,000,000.00
5. 2. 3. 04. 05.	Belanja modal pengadaan karavan	195,000,000.00
5. 2. 3. 05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	200,000,000.00
5. 2. 3. 05. 09.	Belanja modal pengadaan kapal kargo	200,000,000.00
5. 2. 3. 08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	680,600,000.00
5. 2. 3. 08. 03.	Belanja modal pengadaan mesin dongkrak	3,400,000.00
5. 2. 3. 08. 04.	Belanja modal pengadaan mesin kompresor	20,500,000.00
5. 2. 3. 08. 05.	Belanja modal pengadaan mesin generator	652,000,000.00
5. 2. 3. 08. 06.	Belanja modal pengadaan peralatan bengkel	4,700,000.00
5. 2. 3. 09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	1,019,085,000.00
5. 2. 3. 09. 03.	Belanja modal pengadaan mesin bajak	250,000,000.00
5. 2. 3. 09. 05.	Belanja modal pengadaan mesin potong	53,500,000.00
5. 2. 3. 09. 06.	Belanja modal pengadaan pompa air	167,585,000.00
5. 2. 3. 09. 09.	Belanja modal pengadaan mesin kompos	548,000,000.00
5. 2. 3. 10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	878,880,140.00
5. 2. 3. 10. 01.	Belanja modal pengadaan mesin tik	154,930,000.00
5. 2. 3. 10. 02.	Belanja modal pengadaan mesin hitung	12,560,000.00
5. 2. 3. 10. 05.	Belanja modal pengadaan mesin cetak	34,320,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 3. 10. 07.	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	9,000,000.00
5. 2. 3. 10. 08.	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	56,870,000.00
5. 2. 3. 10. 10.	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	50,000,000.00
5. 2. 3. 10. 11.	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	44,000,000.00
5. 2. 3. 10. 12.	Belanja modal pengadaan alat pendingin ruangan	370,974,000.00
5. 2. 3. 10. 13.	Belanja modal pengadaan mesin absensi	10,000,000.00
5. 2. 3. 10. 14.	Belanja modal pengadaan peralatan audio visual	3,000,000.00
5. 2. 3. 10. 16.	Belanja modal pengadaan penghisap debu	5,000,000.00
5. 2. 3. 10. 17.	Belanja modal pengadaan papan plang kantor	73,400,000.00
5. 2. 3. 10. 21.	Belanja modal pengadaan TV	54,826,140.00
5. 2. 3. 11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,515,969,000.00
5. 2. 3. 11. 02.	Belanja modal pengadaan almari	400,325,000.00
5. 2. 3. 11. 03.	Belanja modal pengadaan brankas	136,880,000.00
5. 2. 3. 11. 04.	Belanja modal pengadaan filling kabinet	370,239,000.00
5. 2. 3. 11. 05.	Belanja modal pengadaan white board	4,500,000.00
5. 2. 3. 11. 07.	Belanja modal pengadaan hiasan ruang kantor	11,500,000.00
5. 2. 3. 11. 08.	Belanja modal pengadaan papan pengumuman	3,900,000.00
5. 2. 3. 11. 09.	Belanja modal pengadaan gerobak	3,000,000.00
5. 2. 3. 11. 10.	Belanja modal pengadaan tenda	1,458,875,000.00
5. 2. 3. 11. 11.	Belanja modal pengadaan papan struktur	126,750,000.00
5. 2. 3. 12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,883,515,400.00
5. 2. 3. 12. 01.	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	61,500,000.00
5. 2. 3. 12. 02.	Belanja modal pengadaan komputer/PC	1,017,514,000.00
5. 2. 3. 12. 03.	Belanja modal pengadaan komputer note book	1,733,550,000.00
5. 2. 3. 12. 04.	Belanja modal pengadaan printer	316,862,600.00
5. 2. 3. 12. 05.	Belanja modal pengadaan scanner	91,500,000.00
5. 2. 3. 12. 08.	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	202,500,000.00
5. 2. 3. 12. 09.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flasdisk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	40,088,800.00
5. 2. 3. 12. 10.	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	20,000,000.00
5. 2. 3. 12. 11.	Belanja modal pengadaan software/aplikasi komputer	400,000,000.00
5. 2. 3. 13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4,172,640,250.00
5. 2. 3. 13. 01.	Belanja modal pengadaan meja kerja	1,176,012,250.00
5. 2. 3. 13. 02.	Belanja modal pengadaan meja rapat	165,000,000.00
5. 2. 3. 13. 03.	Belanja modal pengadaan meja makan	15,000,000.00
5. 2. 3. 13. 04.	Belanja modal pengadaan kursi kerja	961,718,000.00
5. 2. 3. 13. 05.	Belanja modal pengadaan kursi rapat	994,140,000.00
5. 2. 3. 13. 07.	Belanja modal pengadaan tempat tidur	212,500,000.00
5. 2. 3. 13. 08.	Belanja modal pengadaan sofa	67,000,000.00
5. 2. 3. 13. 09.	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	242,810,000.00
5. 2. 3. 13. 10.	Belanja modal pengadaan kursi sekolah	247,700,000.00
5. 2. 3. 13. 11.	Belanja modal pengadaan meja sekolah	74,760,000.00
5. 2. 3. 13. 13.	Belanja modal pengadaan kursi tunggu	16,000,000.00
5. 2. 3. 14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	20,900,000.00
5. 2. 3. 14. 04.	Belanja modal pengadaan dispenser	3,000,000.00
5. 2. 3. 14. 05.	Belanja modal pengadaan kulkas	14,400,000.00
5. 2. 3. 14. 08.	Belanja modal pengadaan vacum cleaner	3,500,000.00
5. 2. 3. 15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	35,000,000.00
5. 2. 3. 15. 04.	Belanja modal pengadaan gorden/tirai	35,000,000.00
5. 2. 3. 16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	904,306,250.00
5. 2. 3. 16. 01.	Belanja modal pengadaan kamera	268,384,250.00
5. 2. 3. 16. 02.	Belanja modal pengadaan handycam	121,922,000.00
5. 2. 3. 16. 03.	Belanja modal pengadaan proyektor	122,000,000.00
5. 2. 3. 16. 05.	Belanja modal pengadaan sound system	46,000,000.00
5. 2. 3. 16. 07.	Belanja modal pengadaan megaphone	346,000,000.00
5. 2. 3. 17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	435,000,000.00
5. 2. 3. 17. 01.	Belanja modal pengadaan telepon	5,000,000.00
5. 2. 3. 17. 02.	Belanja modal pengadaan faximili	5,000,000.00
5. 2. 3. 17. 03.	Belanja modal pengadaan radio SSB	40,000,000.00
5. 2. 3. 17. 04.	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (handy talkie)	93,000,000.00
5. 2. 3. 17. 07.	Belanja modal pengadaan alat sandi	200,000,000.00
5. 2. 3. 17. 08.	Belanja modal pengadaan peralatan internet wireless	92,000,000.00
5. 2. 3. 18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	2,687,000,000.00
5. 2. 3. 18. 04.	Belanja modal pengadaan alat GPS	30,000,000.00
5. 2. 3. 18. 05.	Belanja modal pengadaan kompas/peralatan navigasi	2,575,000,000.00
5. 2. 3. 18. 13.	Belanja modal pengadaan alat ukur digital	82,000,000.00
5. 2. 3. 19.	Belanja Modal pengadaan Alat-alat Kedokteran	3,487,226,000.00
5. 2. 3. 19. 01.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	2,260,400,000.00
5. 2. 3. 19. 02.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi	100,000,000.00
5. 2. 3. 19. 13.	Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi	25,000,000.00
5. 2. 3. 19. 14.	Belanja modal pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis	1,101,826,000.00
5. 2. 3. 20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	4,935,250,200.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 3. 20. 02.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	6,270,000.00
5. 2. 3. 20. 03.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia	200,000,000.00
5. 2. 3. 20. 07.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	200,000,000.00
5. 2. 3. 20. 08.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium bahasa	426,000,000.00
5. 2. 3. 20. 09.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium penguji kualitas air	528,400,000.00
5. 2. 3. 20. 10.	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah	3,279,580,200.00
5. 2. 3. 20. 11.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan	295,000,000.00
5. 2. 3. 21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	139,601,280,950.00
5. 2. 3. 21. 04.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan lapis hotmix	76,202,082,000.00
5. 2. 3. 21. 05.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan lapis penetrasi macadam	2,295,179,800.00
5. 2. 3. 21. 06.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan beton bertulang	31,052,953,450.00
5. 2. 3. 21. 07.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan semen	9,439,378,000.00
5. 2. 3. 21. 08.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan tanah	20,611,687,700.00
5. 2. 3. 22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	10,127,152,000.00
5. 2. 3. 22. 04.	Belanja modal pengadaan konstruksi penyebrangan diatas air	10,127,152,000.00
5. 2. 3. 23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	17,885,661,200.00
5. 2. 3. 23. 01.	Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan	2,050,161,200.00
5. 2. 3. 23. 06.	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	7,705,000,000.00
5. 2. 3. 23. 10.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase	7,800,500,000.00
5. 2. 3. 23. 11.	Belanja modal pengadaan konstruksi kolam	130,000,000.00
5. 2. 3. 23. 13.	Belanja modal pengadaan konstruksi instalasi jaringan air	200,000,000.00
5. 2. 3. 24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan jalan, Taman dan Hutan Kota	100,000,000.00
5. 2. 3. 24. 04.	Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan	100,000,000.00
5. 2. 3. 25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	3,765,000,000.00
5. 2. 3. 25. 01.	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	2,940,000,000.00
5. 2. 3. 25. 02.	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	200,000,000.00
5. 2. 3. 25. 03.	Belanja modal pengadaan pembangkit listrik	625,000,000.00
5. 2. 3. 26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	267,133,493,469.50
5. 2. 3. 26. 01.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	28,806,312,770.00
5. 2. 3. 26. 03.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	3,049,278,538.00
5. 2. 3. 26. 04.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	775,000,000.00
5. 2. 3. 26. 08.	Belanja modal pengadaan konstruksi pelabuhan/tambatan perahu	11,010,000,000.00
5. 2. 3. 26. 09.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung/tempat	88,705,761,765.00
5. 2. 3. 26. 10.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bandar udara	61,887,180,000.00
5. 2. 3. 26. 12.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan lainnya	72,899,960,396.50
5. 2. 3. 27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10,442,389,400.00
5. 2. 3. 27. 13.	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	10,106,389,400.00
5. 2. 3. 27. 16.	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	5,000,000.00
5. 2. 3. 27. 17.	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia	60,000,000.00
5. 2. 3. 27. 21.	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	22,500,000.00
5. 2. 3. 27. 25.	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe	248,500,000.00
5. 2. 3. 29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	400,000,000.00
5. 2. 3. 29. 02.	Belanja modal pengadaan ternak	400,000,000.00
5. 2. 3. 30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	23,800,000.00
5. 2. 3. 30. 10.	Belanja modal pengadaan helm	23,800,000.00
5. 2. 3. 32.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	1,495,000,000.00
5. 2. 3. 32. 03.	Belanja modal pengadaan marka/rambu-rambu	1,465,000,000.00
5. 2. 3. 32. 04.	Belanja modal pengadaan alat ID Card	10,000,000.00
5. 2. 3. 32. 06.	Belanja modal pengadaan kasur	15,000,000.00
5. 2. 3. 32. 07.	Belanja modal pengadaan alat pengolahan arsip	5,000,000.00
	Jumlah	1,620,497,419,170.00
	Surplus / (Defisit)	(145,000,000,000.00)
6.	PEMBIAYAAN	
6. 1.	Penerimaan Pembiayaan	155,000,000,000.00
6. 1. 1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	155,000,000,000.00
6. 1. 1. 04.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	155,000,000,000.00
6. 1. 1. 04. 01.	Belanja pegawai dari belanja tidak langsung	27,000,000,000.00
6. 1. 1. 04. 02.	Belanja pegawai dari belanja langsung	128,000,000,000.00
	Jumlah	155,000,000,000.00
6. 2.	Pengeluaran Pembiayaan	10,000,000,000.00
6. 2. 2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,000,000,000.00
6. 2. 2. 02.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10,000,000,000.00
6. 2. 2. 02. 01.	PT. BANK RIAUKEPRI	5,000,000,000.00
6. 2. 2. 02. 03.	Perusda	5,000,000,000.00
	Jumlah	10,000,000,000.00
	Pembiayaan neto	145,000,000,000.00
	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)	0

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3

Ranai, 18 Januari 2013

Bupati

ttd

ILYAS SABLII